

**PENGEMBANGAN KAPASITAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
OLEH SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
SIRIMAU KOTA AMBON PROVINSI MALUKU**

Fajar Razad

NPP. 32.0995

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.0995@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Maris Gunawan Rukmana, S.IP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Community Protection Units (Satlinmas) in Sirimau District face significant challenges in capacity development, particularly evident in the management of 58 disaster events during 2023-2024 with limited personnel (140 personnel for 392 polling stations), inadequate training completion rates (only 62%), and insufficient budget allocation (0.25% of city budget). **Purpose:** This study aims to analyze the capacity development process of Satlinmas by Community Protection Task Force in Sirimau District, Ambon City. **Method:** This research employs a qualitative approach with descriptive analytical methods. Data collection includes in-depth interviews with nine key informants, field observations, and documentation studies. Data analysis utilized Miles, Huberman, and Saldana's interactive analysis model. **Result:** Community Participation Dimension: Limited volunteer interest (45%), inadequate communication mechanisms with formal reporting system adoption only 25% compared to WhatsApp groups (85%). Leadership Dimension: Significant gender inequality with women representation only 10-15% in leadership development programs, suboptimal performance evaluation system implementation (65%). Resource Access Dimension: Stagnant budget allocation at 0.25% of city budget, equipment gaps reaching 60-70% for critical components, uneven information technology system development. Social Network Dimension: Varied coordination intensity with high effectiveness with Satpol PP and community leaders, but limited policy advocacy activities (only 15% member involvement). **Conclusion:** This study concludes that the capacity development process of the Community Protection Units (Satlinmas) by the Community Protection Task Force in Sirimau District, Ambon City, has yet to be optimal in integrating the four main dimensions of capacity development. This research suggests that the government increase the budget for Satlinmas gradually to reach a minimum of 1% of the city budget in accordance with national standard recommendations.

Keywords: Capacity Development, Community Protection Units, Community Participation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kecamatan Sirimau menghadapi tantangan signifikan dalam pengembangan kapasitas, khususnya dalam penanganan 58 kejadian bencana selama 2023-2024 dengan keterbatasan personil (140 personil untuk 392 TPS), tingkat penyelesaian pelatihan yang tidak memadai (hanya 62%), dan alokasi anggaran yang tidak mencukupi (0,25% dari anggaran kota). **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Sirimau Kota Ambon. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan sembilan informan kunci, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. **Hasil/Temuan:** Dimensi Partisipasi Masyarakat: Minat sukarelawan terbatas (45%), mekanisme komunikasi belum optimal dengan adopsi sistem pelaporan formal hanya 25% dibanding grup WhatsApp (85%). Dimensi Kepemimpinan: Ketimpangan gender signifikan dengan representasi perempuan hanya 10-15% dalam program pengembangan kepemimpinan, implementasi sistem evaluasi kinerja belum optimal (65%). Dimensi Akses Sumber Daya: Alokasi anggaran stagnan pada 0,25% dari anggaran kota, kesenjangan peralatan mencapai 60-70% untuk komponen kritis, pengembangan sistem teknologi informasi tidak merata. Dimensi Jaringan Sosial: Intensitas koordinasi bervariasi dengan efektivitas tinggi bersama Satpol PP dan tokoh masyarakat, namun aktivitas advokasi kebijakan terbatas (hanya 15% keterlibatan anggota). **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Sirimau Kota Ambon belum optimal dalam mengintegrasikan empat dimensi utama pengembangan kapasitas. Saran penelitian ini pemerintah meningkatkan anggaran untuk satlinmas secara bertahap hingga mencapai minimum 1% dari anggaran kota sesuai dengan rekomendasi standar Nasional.

Kata kunci: Pengembangan Kapasitas, Satuan Perlindungan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan stabilitas dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan populasi lebih dari 282 juta jiwa (BPS, 2024), menghadapi tantangan unik dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Hal ini mengingat keragaman geografis, demografis, dan sosial budaya yang menjadi karakteristik unik bangsa Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami transformasi dari model sentralistik menuju desentralistik, sesuai dengan amanat reformasi dan tuntutan demokratisasi yang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Transformasi ini bukan sekedar perubahan administratif, melainkan mencerminkan paradigma

baru dalam tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat lokal. Desentralisasi telah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satu urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas ini, kepala daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Satlinmas di bawah naungan Satpol PP, berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kecamatan Sirimau menghadapi sejumlah tantangan yang tidak hanya terkait dengan keterbatasan sumber daya tetapi juga dengan dimensi sosial dan kelembagaan yang lebih luas. Penelitian mengenai daya tahan komunitas (*community resilience*) menunjukkan bahwa faktor sosial dan jejaring masyarakat memainkan peran penting dalam ketahanan masyarakat terhadap bencana. Aldrich dan Meyer (2015) menyatakan bahwa modal sosial adalah kunci untuk meningkatkan ketahanan komunitas dalam menghadapi bencana, dengan komunitas yang terorganisir lebih mampu mengatasi tantangan yang ada. Selain itu, konsep ketahanan masyarakat juga didorong oleh pengelolaan risiko bencana yang baik, seperti yang dijelaskan oleh Alexander (2013), yang menekankan pentingnya pemahaman tentang ketahanan dalam konteks pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu, dalam pengembangan kapasitas Satlinmas, peran komunitas lokal dalam membantu membangun sistem perlindungan yang lebih efektif harus diakui dan diperkuat. Dalam konteks bencana, penting untuk memahami secara mendalam definisi dan dampak bencana terhadap masyarakat. Quarantelli (1998) menjelaskan bahwa bencana dapat dipahami melalui berbagai perspektif, tergantung pada konteks dan pemahaman masyarakat terhadap kejadian tersebut. Pemahaman ini sangat penting dalam merancang program pengembangan kapasitas yang efektif, khususnya dalam konteks Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang terlibat langsung dalam penanggulangan bencana.

Pentingnya pendekatan yang komprehensif dalam mengembangkan kapasitas Satlinmas dapat dilihat dari berbagai teori terkait pengembangan kapasitas dan penerapan dalam konteks bencana. Soekanto (2002) dalam bukunya *Sosiologi: Suatu Pengantar* menyatakan bahwa pemahaman terhadap struktur sosial dan dinamika masyarakat adalah kunci dalam merancang program pengembangan kapasitas yang efektif dalam masyarakat yang heterogen. Spradley (1980) mengemukakan bahwa pengamatan partisipan dalam penelitian kualitatif sangat berharga untuk menggali informasi yang lebih dalam tentang praktik sehari-hari dan dinamika kelompok dalam organisasi seperti Satlinmas. Selain itu, Sugiyono (2012) menjelaskan berbagai metode penelitian, baik kualitatif, kuantitatif, maupun R&D, yang relevan untuk digunakan dalam analisis data terkait pengembangan kapasitas.

Castells (2015) dalam teorinya tentang "network society" mengungkapkan bahwa masyarakat yang terhubung dengan jaringan sosial yang kuat cenderung memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap bencana, karena komunikasi yang cepat dan efektif dalam situasi darurat. Chambers (1997) menambahkan bahwa pengembangan kapasitas masyarakat harus berlandaskan pada realitas lokal dan partisipasi aktif masyarakat, bukan sekedar pendekatan top-down yang sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan komunitas. Oleh karena itu, dalam

pengembangan kapasitas Satlinmas, peran komunitas lokal dalam membantu membangun sistem perlindungan yang lebih efektif harus diakui dan diperkuat.

Kota Ambon, sebagai salah satu kota strategis di Indonesia Timur, memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi dinamika ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain karakteristik geografis kota Ambon dengan topografi berbukit (73% wilayah), garis pantai yang panjang (98 km), kawasan rawan bencana, dan pemukiman yang tersebar tidak merata. Faktor demografis dan sosial budaya juga menjadi perhatian, seperti heterogenitas penduduk (agama, suku, budaya), dengan potensi konflik antar-komunitas.

Kecamatan Sirimau, sebagai salah satu dari lima kecamatan di Kota Ambon, menghadapi dinamika ketertiban umum dan keamanan masyarakat yang kompleks. Berdasarkan data dari BPS Kota Ambon tahun 2023, Kecamatan Sirimau dengan jumlah penduduk 176.204 jiwa, menjadikannya kecamatan terpadat di Kota Ambon dengan kepadatan penduduk mencapai 2.031 jiwa/km². Keragaman demografis dan sosial budaya menjadi ciri khas Kecamatan Sirimau. Penduduknya terdiri dari berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya, dengan potensi konflik antar-komunitas yang masih menjadi perhatian. Untuk membantu mengatasi masalah keamanan dan ketertiban, pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di tingkat lokal merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah. Pemerintah Kota Ambon telah membentuk Satlinmas dengan kekuatan 500 personil yang tersebar di 5 kecamatan, dengan Kecamatan Sirimau memiliki jumlah anggota terbanyak yaitu 140 personil.

Namun, jumlah ini masih belum memadai ketika dibandingkan dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencapai 392 di Kecamatan Sirimau. Sesuai regulasi, setiap TPS harus dijaga oleh minimal 2 personil Satlinmas, menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas yang signifikan. Selain itu, Satlinmas juga diharapkan berperan sebagai garda terdepan dalam merespons situasi darurat, termasuk penanggulangan bencana. Data menunjukkan bahwa selama 2023-2024, tercatat 58 kejadian bencana di Kecamatan Sirimau, meliputi tanah longsor (40 kejadian), banjir (15 kejadian), dan angin kencang (3 kejadian), dengan total kerugian mencapai Rp 6,2 miliar. Namun, kontribusi Satlinmas dalam menangani bencana-bencana ini masih sangat terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, pelatihan, dan kesiapan anggota Satlinmas dalam menghadapi situasi darurat.

Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon menunjukkan bahwa hanya 62% anggota Satlinmas yang telah mengikuti pelatihan dasar, sementara pelatihan spesialisasi baru mencapai 28%. Hal ini mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk merespons bencana secara efektif. Pengembangan Satlinmas di Kecamatan Sirimau juga terkendala keterbatasan anggaran, sarana prasarana, dan teknologi. Alokasi anggaran Satlinmas dalam APBD Kota Ambon tahun 2023 hanya mencapai 0,25% atau sekitar Rp 1,2 miliar dari total APBD (BPKAD Kota Ambon, 2023). Persentase ini jauh di bawah rata-rata kota lainnya yang berkisar 1-2% dari total APBD sebagaimana direkomendasikan dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020. Tantangan tersebut menuntut adanya strategi pengembangan kapasitas Satlinmas yang komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kapasitas Satlinmas Kecamatan Sirimau saat ini, mengidentifikasi faktor penghambat yang mempengaruhi, serta upaya untuk mengatasi faktor penghambat pengembangan kapasitas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi peningkatan kinerja Satlinmas dalam membantu Satpol PP menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, khususnya di Kecamatan Sirimau dan Kota Ambon secara umum.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa kesenjangan yang signifikan dalam pengembangan kapasitas Satlinmas di Kecamatan Sirimau: Kesenjangan Kuantitas SDM: Jumlah anggota Satlinmas di Kecamatan Sirimau (140 personil) tidak sebanding dengan jumlah TPS (392) yang seharusnya dijaga minimal oleh 2 personil Satlinmas per TPS, menciptakan defisit personil yang signifikan. Kondisi ini menyebabkan ketidakberdayaan Satlinmas dalam menjalankan tugas pengamanan dan perlindungan masyarakat secara efektif. Kesenjangan Kualitas SDM: Hanya 62% anggota Satlinmas yang telah mengikuti pelatihan dasar, dan pelatihan spesialisik baru mencapai 28%. Kesenjangan kompetensi ini berdampak langsung pada kemampuan Satlinmas dalam menghadapi berbagai situasi darurat, seperti yang terjadi pada 58 kejadian bencana di Kecamatan Sirimau selama 2023-2024. Kesenjangan Anggaran: Alokasi anggaran Satlinmas dalam APBD Kota Ambon tahun 2023 hanya mencapai 0,25% dari total APBD, jauh di bawah rekomendasi 1-2% untuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi. Keterbatasan anggaran ini membatasi upaya pengembangan kapasitas, pengadaan peralatan, dan operasional Satlinmas.

Kesenjangan Peralatan dan Teknologi: Terdapat keterbatasan signifikan dalam peralatan komunikasi dan sarana transportasi yang menjadi hambatan serius dalam operasional Satlinmas, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis menantang seperti Kecamatan Sirimau. Kesenjangan Implementasi Konsep Pengembangan Kapasitas: Meskipun secara teoretis terdapat berbagai pendekatan pengembangan kapasitas yang relevan, implementasi praktisnya di Satlinmas Kecamatan Sirimau belum optimal, terutama dalam mengintegrasikan dimensi partisipasi masyarakat, kepemimpinan, akses terhadap sumber daya, dan jaringan sosial.

1.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian relevan telah menjadi referensi penting dalam studi ini. Rohmanu (2019) dalam penelitiannya berjudul "Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam Penanggulangan Bencana di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang" menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis interaktif model Miles, Huberman & Saldana. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan Satlinmas dilakukan melalui tiga tahap yaitu: penyadaran melalui kegiatan penyuluhan, peningkatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan, dan pemberian kewenangan melalui pengawasan kesiapsiagaan oleh Kepala Desa. Faktor penghambat internal meliputi keterbatasan sarana prasarana dan kurangnya pengetahuan/keterampilan anggota, sedangkan faktor eksternal yaitu kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kondisi geografis yang rawan bencana.

Penelitian oleh Berkes dan Ross (2013) mengusulkan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam meningkatkan ketahanan komunitas, yang menyatukan sumber daya lokal dengan struktur organisasi yang ada. Selain itu, Boin dan McConnell (2007) menyoroti keterbatasan dalam manajemen krisis tradisional dan kebutuhan akan peningkatan kapasitas organisasi dalam menghadapi kerusakan infrastruktur yang besar. Pada konteks lokal, kajian-kajian ini relevan dalam mendeskripsikan tantangan yang dihadapi oleh Satlinmas dalam menanggulangi bencana dengan keterbatasan sumber daya yang ada, baik dari sisi anggaran maupun keterampilan personil. Penelitian mengenai ketahanan komunitas oleh Cutter et al. (2008) menyoroti pentingnya model berbasis tempat untuk memahami ketahanan terhadap bencana.

alam, yang sangat relevan untuk konteks geografi yang spesifik di Kecamatan Sirimau. Dalam hal analisis data kualitatif, Denzin (2012) mengemukakan pentingnya triangulasi untuk meningkatkan validitas penelitian melalui berbagai sumber data, perspektif, dan metode. Sementara itu, Dey (1993) mengajukan pendekatan analisis data kualitatif yang dapat membantu dalam mengeksplorasi dinamika pengembangan kapasitas di lapangan. Sebagai tambahan, Goleman (2000) membahas pentingnya kepemimpinan emosional dalam situasi krisis, yang sangat penting dalam konteks kepemimpinan Satlinmas yang berfokus pada ketahanan bencana. Dalam kerangka pengembangan kapasitas organisasi publik, Grindle (1997) menekankan bahwa membangun kapasitas yang efektif di sektor publik membutuhkan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada kebutuhan jangka Panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Holstein dan Gubrium (2020) tentang wawancara aktif memberikan wawasan penting dalam pengumpulan data kualitatif untuk penelitian ini, karena metode wawancara yang efektif sangat penting dalam memahami pengalaman langsung anggota Satlinmas. Kapucu dan Garayev (2011) menunjukkan bahwa pengambilan keputusan kolaboratif dalam manajemen darurat sangat penting, terutama dalam koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Kusumasari dan Alam (2012) menyoroti peran kapasitas pemerintah lokal dalam manajemen bencana, yang sangat relevan dalam konteks penelitian ini untuk meningkatkan kapasitas Satlinmas. Kvale (2008) juga memberikan panduan tentang cara melakukan wawancara yang mendalam untuk mendapatkan data yang lebih kaya tentang dinamika yang ada. Selain itu, penelitian tentang mobilisasi sumber daya oleh McCarthy dan Zald (1977) memberikan perspektif yang berguna dalam merencanakan diversifikasi sumber daya untuk Satlinmas. Sementara itu, Renschler et al. (2010) mengembangkan kerangka ketahanan *PEOPLES* yang dapat digunakan untuk mendefinisikan dan mengukur ketahanan bencana pada tingkat komunitas. Kerangka ini memberikan perspektif yang sangat berguna untuk menilai ketahanan komunitas di Kecamatan Sirimau, dengan karakteristik geografi yang berisiko tinggi.

Milen (2004) mengemukakan bahwa pengembangan kapasitas harus didasarkan pada pemahaman yang kuat terhadap kerangka dasar yang berlaku, yang mengintegrasikan berbagai aspek yang saling berkaitan dalam organisasi dan masyarakat. Morgan (1998) dalam bukunya *Images of Organization* menyarankan bahwa organisasi harus dipahami melalui berbagai lensa, yang mencakup simbol, citra, dan struktur yang mempengaruhi cara mereka beroperasi dan merespons perubahan. Sementara itu, Muladi (2002) menekankan pentingnya demokrasi dan hak asasi manusia dalam reformasi hukum di Indonesia, yang juga relevan dengan konteks pengembangan kapasitas di sektor publik, termasuk dalam penanggulangan bencana. Norris, Friedman, dan Watson (2002) dalam penelitian mereka mengungkapkan bahwa penelitian kesehatan mental pasca-bencana sangat penting untuk memahami dampak psikologis pada korban bencana dan memberikan dasar bagi intervensi yang lebih efektif. Patel, Rogers, Amlôt, dan Rubin (2017) memberikan tinjauan sistematis tentang bagaimana konsep "ketahanan komunitas" didefinisikan dalam literatur, yang memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dimensi ketahanan yang harus dibangun dalam masyarakat. Patton (2002) menyoroti pentingnya pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang kompleks, seperti pengembangan kapasitas

Satlinmas. Selain itu, Potter dan Brough (2004) mengembangkan model kapasitas sistemik yang menyarankan adanya hierarki kebutuhan dalam pembangunan kapasitas, yang relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh Satlinmas dalam mencapai kapasitas operasional yang optimal

Pramono & Kinasih (2020) dalam penelitian mereka berjudul "Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Surakarta (Studi Pemberdayaan dan Pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat)" melakukan penelitian deskriptif kualitatif tentang bentuk perlindungan dan pemberdayaan Satlinmas di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan pengorganisasian Satlinmas berada di bawah Satpol PP dengan struktur organisasi terdiri dari kepala satuan, kepala satuan tugas, kepala regu, dan anggota. Kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan peran serta dan prakarsa, peningkatan kesiapsiagaan, penanganan tanggap darurat, pengendalian operasi dan pembekalan. Prihantika & Puspawati (2021) dalam studi berjudul "Kapasitas Komunitas Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dalam Upaya Mewujudkan Kabupaten Pringsewu Layak Anak" menganalisis kapasitas komunitas menggunakan teori pengembangan kapasitas Chaskin et al. (2001). Hasil utama menunjukkan bahwa komunitas Satgas PATBM memiliki rasa kebersamaan dan komitmen tinggi namun terkendala sumber daya finansial dan dukungan aparat.

Pramono & Suranto (2022) dalam penelitian pengabdian masyarakat berjudul "Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta" mengkaji pengembangan kapasitas Satlinmas pada level individu yang meliputi 6 aspek: pengetahuan dan kompetensi, pelatihan, etika kerja, perekrutan dan pemanfaatan, penggajian, serta kondisi tempat kerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya baik dari segi SDM maupun anggaran yang menghambat optimalisasi pengembangan kapasitas. Motivasi anggota yang rendah dan minimnya prinsip sukarela juga menjadi kendala utama. Ningtiyas (2023) dalam penelitian berjudul "Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Timur" menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan perlindungan masyarakat berjalan baik didukung faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Rukmana (2020) mengkaji efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung dan menekankan pentingnya peran struktural dalam pengelolaan ketertiban di tingkat lokal, yang juga relevan dengan peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban. Penelitian lanjutan oleh Rukmana (2021) di Kota Semarang menunjukkan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam mencapai tujuan bersama dalam ketertiban umum, yang dapat diterapkan pada konteks pengembangan kapasitas Satlinmas.

Surjan dan Shaw (2008) membahas konsep komunitas berkelanjutan yang dapat beradaptasi dengan bencana, dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial, yang penting untuk membangun ketahanan komunitas seperti yang dijalankan oleh Satlinmas. UNDP (2009) menyatakan bahwa pengembangan kapasitas yang efektif

memerlukan pendekatan yang berbasis pada kerangka kerja yang memadai untuk mendukung organisasi dalam menjawab tantangan yang kompleks

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan ilmiah melalui beberapa aspek: Pertama, penerapan kerangka teoretis Chaskin et al. (2001) yang mengintegrasikan empat dimensi pengembangan kapasitas dalam konteks Satlinmas di daerah kepulauan dengan karakteristik unik. Berbeda dengan Rohmanu (2019) yang fokus pada pemberdayaan melalui tiga tahap (penyadaran, peningkatan kapasitas, pemberian kewenangan), penelitian ini menganalisis secara simultan empat dimensi yang saling berinteraksi. Kedua, konteks geografis dan demografis Kecamatan Sirimau yang unik (topografi berbukit 73%, kepadatan 2.031 jiwa/km², multi-etnis dan multi-agama) memberikan perspektif baru. Berbeda dengan Pramono & Kinasih (2020) yang meneliti Kota Surakarta dengan karakteristik dataran rendah dan homogenitas budaya relatif tinggi, penelitian ini mengeksplorasi adaptasi model pengembangan kapasitas pada konteks kepulauan dengan tantangan geografis dan sosio-kultural yang kompleks.

Ketiga, identifikasi kesenjangan kapasitas berbasis data empiris komprehensif (analisis 58 kejadian bencana, 392 TPS, alokasi anggaran 0,25%). Berbeda dengan Prihantika & Puspawati (2021) yang fokus pada kapasitas komunitas Satgas PATBM untuk perlindungan anak, penelitian ini menganalisis gap analysis yang lebih luas mencakup personil, pelatihan, anggaran, dan peralatan. Keempat, pengembangan model strategi diversifikasi sumber daya dan integrasi kearifan lokal Maluku ("Pela Gandong", "Masohi", "Sasi"). Berbeda dengan Pramono & Suranto (2022) yang fokus pada pengembangan kapasitas level individu di Kelurahan Pucangsawit, penelitian ini mengembangkan model inovatif yang mengintegrasikan pendanaan alternatif dan nilai-nilai lokal. Kelima, analisis ketimpangan gender dalam kepemimpinan Satlinmas (representasi perempuan 10-15%) sebagai faktor pengembangan kapasitas. Berbeda dengan Ningtiyas (2023) yang menganalisis implementasi kebijakan perlindungan masyarakat secara umum di Jawa Timur, penelitian ini secara spesifik mengidentifikasi dan menganalisis dimensi gender yang belum dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya.

Keenam, penelitian ini mengembangkan perspektif baru tentang pengembangan kapasitas Satlinmas yang berbasis pada perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana. Berbeda dengan Rukmana (2020, 2021) yang fokus pada efektivitas peran Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung dan Semarang dengan pendekatan penegakan peraturan daerah, penelitian ini mengeksplorasi dimensi yang lebih luas yaitu pengembangan kapasitas organisasi berbasis masyarakat untuk resiliensi komunitas dalam menghadapi bencana dan ancaman keamanan di wilayah kepulauan dengan karakteristik multi-risiko

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan proses pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Sirimau, Faktor penghambat dalam proses pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat, serta Upaya yang dilakukan oleh

Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dalam mengatasi faktor penghambat pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Untuk mendalami lebih jauh tentang desain penelitian yang relevan dengan konteks ini, Creswell (2014) memberikan panduan tentang bagaimana merancang penelitian dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran, yang dapat memperkaya studi ini dengan pendekatan yang lebih *holistic*. Dalam melakukan penelitian ini, metode studi kasus yang dijelaskan oleh Yin (2014) sangat relevan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pengembangan kapasitas Satlinmas di Kecamatan Sirimau, dengan pendekatan yang *holistik*. Wolcott (2009) menambahkan bahwa penulisan hasil penelitian kualitatif harus mampu menggambarkan kompleksitas data yang diperoleh dengan jelas dan terstruktur, yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan penelitian ini

Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada beberapa pertimbangan: Pertama, kompleksitas fenomena pengembangan kapasitas Satlinmas yang melibatkan *multiple stakeholders* dan dimensi yang saling berinteraksi membutuhkan eksplorasi mendalam yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan kuantitatif. Kedua, konteks lokal Kecamatan Sirimau dengan karakteristik geografis, demografis, dan sosio-kultural yang unik memerlukan pemahaman interpretatif yang mendalam. Ketiga, terbatasnya penelitian sebelumnya tentang pengembangan kapasitas Satlinmas di konteks kepulauan Indonesia Timur membutuhkan pendekatan eksploratif untuk mengungkap pola-pola yang belum teridentifikasi.

Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: keterlibatan langsung dalam proses pengembangan kapasitas Satlinmas minimal 2 tahun, pemahaman komprehensif tentang tantangan dan dinamika Satlinmas di Kecamatan Sirimau, representasi dari berbagai level organisasi dan pemangku kepentingan, serta kesediaan memberikan informasi secara terbuka dan mendalam. Informan kunci dan alasan pemilihan: Richard Luhukay, AP (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja): Sebagai pimpinan tertinggi yang memiliki otoritas kebijakan dan pandangan strategis tentang pengembangan Satlinmas secara keseluruhan, Hendrik Risakotta (Kepala Satgas Linmas): Sebagai koordinator langsung yang memahami operasional harian dan tantangan implementasi program pengembangan kapasitas, Burhan Marasabessy (Anggota Satlinmas): Mewakili perspektif implementor lapangan yang mengalami langsung dampak program pengembangan kapasitas, Tokoh Masyarakat (2 orang dari kelurahan berbeda): Memberikan perspektif eksternal tentang efektivitas Satlinmas dan partisipasi Masyarakat, Perwakilan BPBD Kota Ambon: Menyediakan perspektif koordinasi lintas instansi dan standar kompetensi manajemen bencana

Waktu, tempat, dan durasi penelitian: Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan (Desember-Januari 2025) di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Lokasi utama meliputi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, Kantor Kecamatan Sirimau, dan 5 kelurahan di Kecamatan Sirimau (Batu Merah, Kudamati, Rijali, Wainitu, Lateri). Pengumpulan data primer dilakukan selama 4 minggu dengan frekuensi kunjungan lapangan 3-4 kali per minggu.

Setiap sesi wawancara mendalam berlangsung 60-90 menit, dengan total 18 sesi wawancara dan 24 sesi observasi partisipatif..

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Pengembangan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Di Kecamatan Sirimau Kota Ambon

3.1.1 Dimensi Partisipasi Masyarakat

Proses rekrutmen anggota Satlinmas di Kecamatan Sirimau telah menerapkan pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh masyarakat, namun menghadapi tantangan berupa minat sukarelawan yang terbatas (45%), insentif yang tidak memadai, dan persaingan dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Mekanisme komunikasi dan koordinasi antara Satlinmas dengan masyarakat belum optimal meskipun telah mengembangkan jalur komunikasi formal dan informal. Grup WhatsApp menunjukkan frekuensi penggunaan dan efektivitas tertinggi (85%), sementara sistem pelaporan formal masih rendah (25%). Penyelenggaraan pelatihan dan simulasi untuk meningkatkan kapasitas tanggap darurat bencana menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan pelatihan kesadaran dasar memiliki tingkat partisipasi cukup tinggi (65%), namun jenis pelatihan teknis seperti simulasi praktis, pelatihan pertolongan pertama, dan sistem peringatan dini memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah (30-45%).

3.1.2 Dimensi Kepemimpinan

Pengembangan kepemimpinan Satlinmas di Kecamatan Sirimau menunjukkan beberapa tantangan signifikan. Program mentorship dan pendampingan untuk pengembangan kepemimpinan telah menerapkan model kepemimpinan kolaboratif, namun masih ditemukan pendekatan direktif yang lebih dominan dalam situasi darurat. Pelatihan keterampilan manajerial dan pengambilan keputusan menunjukkan ketimpangan gender yang signifikan dengan representasi perempuan hanya 10-15% dalam program mentorship, lokakarya, dan latihan lapangan. Sistem evaluasi kinerja dan akuntabilitas kepemimpinan Satlinmas menunjukkan implementasi yang belum optimal, dengan sistem evaluasi kinerja periodik (implementasi 65%), kode etik Satlinmas (sosialisasi 80%, implementasi 60%), mekanisme pengaduan masyarakat (ketersediaan 45%), dan laporan pertanggungjawaban kegiatan (kelengkapan 55%, ketepatan waktu 40%).

3.1.3 Dimensi Akses Terhadap Sumber Daya

Keterbatasan akses terhadap sumber daya menjadi kendala signifikan dalam pengembangan kapasitas Satlinmas di Kecamatan Sirimau. Alokasi anggaran stagnan pada 0,25% dari anggaran kota sejak 2023, jauh di bawah rekomendasi 1-2% untuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi. Kesenjangan peralatan mencapai 60-70% untuk komponen kritis seperti radio komunikasi dan kendaraan operasional, menghambat koordinasi efektif dan respons cepat terhadap situasi darurat. Sistem pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan perkembangan yang tidak merata, dengan platform komunikasi digital (WhatsApp) menunjukkan tingkat adopsi tinggi (85%), namun sistem pelaporan digital (25%),

sistem informasi geografis (15%), dan platform koordinasi multi-stakeholder (35%) masih memiliki tingkat adopsi rendah.

Tabel 1. Alokasi Anggaran untuk Operasional Satlinmas (2021-2024)

Tahun	Persentase dari Anggaran Kota	Nilai Absolut (Rp)	Alokasi Per Kapita (Rp)
2021	0,18%	950 juta	5.400
2022	0,22%	1,05 miliar	5.960
2023	0,25%	1,2 miliar	6.820
2024	0,25%	1,2 miliar	6.820

Sumber: BPKAD Kota Ambon, 2025

3.1.4 Dimensi Jaringan Sosial

Koordinasi lintas instansi yang dilakukan oleh Satlinmas di Kecamatan Sirimau menunjukkan variasi dalam intensitas dan efektivitas. Koordinasi dengan Satpol PP dan tokoh masyarakat menunjukkan intensitas dan efektivitas yang tinggi, sementara koordinasi dengan BPBD masih sedang, dan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan masih rendah.

Tabel 2. Intensitas dan Efektivitas Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Intensitas Koordinasi	Efektivitas Koordinasi	Mekanisme Utama
Satpol PP	Tinggi	Tinggi	Pertemuan rutin mingguan, komunikasi real-time
BPBD	Sedang	Sedang	Forum koordinasi bulanan, simulasi bersama
Tokoh Masyarakat	Tinggi	Tinggi	Pertemuan warga, konsultasi
Pemerintah Kelurahan	Tinggi	Sedang	Rapat koordinasi, pelaporan
Organisasi Kemasyarakatan	Rendah	Rendah	Interaksi informal, kegiatan bersama sesekali

Sumber: Data primer, diolah oleh penulis, 2025

Pertukaran informasi dan sumber daya antar lembaga belum optimal, dengan dominasi platform komunikasi instan seperti WhatsApp (frekuensi penggunaan sangat tinggi, efektivitas tinggi) dan penggunaan laporan resmi tertulis yang masih rendah (frekuensi rendah, efektivitas rendah). Aktivitas advokasi kebijakan untuk penguatan peran dan fungsi Satlinmas masih terbatas, dengan hanya 15% anggota Satlinmas terlibat dalam advokasi kebijakan di tingkat kota

Integrasi Multidimensional dalam Pengembangan Kapasitas Satlinmas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas Satlinmas di Kecamatan Sirimau mengalami fragmentasi dalam implementasi keempat dimensi yang diidentifikasi Chaskin et al. (2001). Fragmentasi ini tercermin dalam ketidakseimbangan perkembangan antar dimensi, di mana dimensi jaringan sosial menunjukkan perkembangan relatif baik

(koordinasi tinggi dengan Satpol PP dan tokoh masyarakat), sementara dimensi akses sumber daya mengalami stagnasi signifikan (alokasi anggaran 0,25% selama 3 tahun berturut-turut). Menurut Potter & Brough (2004), pengembangan kapasitas yang efektif memerlukan keseimbangan antara komponen 'keras' (infrastruktur, sumber daya material) dan komponen 'lunak' (keterampilan, motivasi, jaringan). Dalam konteks Satlinmas Kecamatan Sirimau, terdapat ketimpangan yang jelas antara pengembangan komponen 'lunak' yang relatif berkembang melalui jaringan sosial yang kuat dan komponen 'keras' yang mengalami defisit serius. Ketimpangan ini menciptakan 'capacity trap' dimana motivasi dan jaringan yang ada tidak dapat ditransformasi menjadi kinerja yang optimal karena keterbatasan sumber daya material.

Analisis lebih mendalam mengungkapkan bahwa fragmentasi ini bukan sekedar masalah alokasi sumber daya, tetapi mencerminkan keterbatasan dalam pemahaman sistemik tentang pengembangan kapasitas. Pendekatan yang diterapkan masih bersifat incremental dan responsif terhadap kebutuhan jangka pendek, bukan strategis dan proaktif untuk pengembangan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan temuan Grindle (1997) bahwa pengembangan kapasitas sektor publik di negara berkembang sering terjebak dalam 'crisis mode' yang mengutamakan respons cepat dibanding investasi sistemik.

Dinamika Partisipasi Masyarakat dalam Konteks Sosio-Kultural Maluku

Dimensi partisipasi masyarakat menunjukkan karakteristik unik yang dipengaruhi oleh konteks sosio-kultural Maluku. Tingkat partisipasi dalam program formal Satlinmas (45% minat sukarelawan) kontras dengan tingkat partisipasi dalam aktivitas berbasis kearifan lokal seperti "Masohi" yang mencapai 70% dalam kegiatan tanggap darurat. Kontras ini mengindikasikan bahwa rendahnya partisipasi bukan karena apati masyarakat, tetapi karena ketidaksesuaian antara model mobilisasi formal dengan struktur sosial tradisional. Sistem "Pela Gandong" yang mengatur aliansi antar komunitas di Maluku memberikan kerangka alternatif untuk memahami pola partisipasi masyarakat. Dalam sistem ini, partisipasi bukan berdasarkan individualisme sukarela seperti yang diasumsikan dalam model pengembangan kapasitas konvensional, tetapi berdasarkan kewajiban kolektif yang tertanam dalam identitas komunal. Bartels (2017) menjelaskan bahwa sistem Pela Gandong menciptakan "obligated solidarity" yang berbeda secara fundamental dengan "voluntary participation" dalam model pembangunan modern.

Adaptasi model partisipasi yang mengintegrasikan struktur sosial tradisional menunjukkan hasil yang menjanjikan. Kelurahan yang mengadopsi pendekatan berbasis "Pela Gandong" dalam rekrutmen Satlinmas menunjukkan tingkat retensi anggota 30% lebih tinggi dibanding kelurahan yang menerapkan pendekatan konvensional. Hal ini mengkonfirmasi argumentasi Chambers (1997) bahwa pembangunan partisipatif yang efektif harus berakar pada struktur sosial lokal yang sudah ada, bukan menciptakan struktur baru yang asing bagi masyarakat.

Transformasi Kepemimpinan dan Ketimpangan Gender

Analisis dimensi kepemimpinan mengungkapkan tension antara model kepemimpinan tradisional yang hierarkis dengan tuntutan kepemimpinan partisipatif dalam konteks organisasi berbasis masyarakat. Ketimpangan gender yang signifikan (representasi perempuan 10-15%)

bukan sekedar masalah numerik, tetapi mencerminkan reproduksi struktur patriarki dalam organisasi yang seharusnya demokratis dan inklusif. Paradoks ini menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan peran perempuan dalam sistem perlindungan tradisional Maluku. Dalam struktur adat, perempuan memiliki peran signifikan dalam sistem peringatan dini berbasis pengetahuan lokal dan mobilisasi sumber daya komunal saat bencana. Namun, peran ini tidak ditranslasikan ke dalam struktur formal Satlinmas yang mengadopsi model organisasi modern dengan bias maskulin.

Goleman (2000) mengidentifikasi bahwa kepemimpinan yang efektif dalam konteks krisis membutuhkan kecerdasan emosional tinggi, empati, dan kemampuan membangun konsensus - karakteristik yang sering lebih kuat pada perempuan. Dalam konteks Satlinmas yang beroperasi di lingkungan berisiko tinggi dengan kebutuhan koordinasi lintas komunitas yang beragam, ketimpangan gender dalam kepemimpinan berpotensi mengurangi efektivitas organisasi secara keseluruhan. Upaya pengembangan kepemimpinan inklusif yang telah diinisiasi menunjukkan hasil awal yang positif. Program mentorship yang melibatkan perempuan pemimpin komunitas tradisional sebagai mentor berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam program pelatihan kepemimpinan sebesar 25%. Namun, perubahan fundamental dalam struktur kepemimpinan membutuhkan waktu lebih lama karena harus mengubah norma sosial yang sudah mengakar.

Inovasi Strategi Pendanaan dan Keberlanjutan Organisasi

Keterbatasan akses sumber daya, khususnya anggaran yang stagnan pada 0,25% dari APBD, memaksa Satlinmas mengembangkan strategi pendanaan inovatif yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur pengembangan kapasitas organisasi perlindungan masyarakat. Strategi diversifikasi pendanaan yang dikembangkan mencerminkan adaptasi kreatif terhadap keterbatasan struktural dan menunjukkan potensi untuk dikembangkan menjadi model yang dapat direplikasi. Kemitraan dengan sektor swasta melalui program CSR berhasil memenuhi 15% kebutuhan anggaran operasional, terutama untuk pengadaan peralatan komunikasi. Kolaborasi dengan lembaga donor internasional (USAID, UNDP) memberikan akses pada program pelatihan berkualitas tinggi yang meningkatkan kompetensi 35% anggota Satlinmas. Penggalangan dana berbasis komunitas melalui adaptasi sistem "Arisan Bencana" berhasil mengumpulkan dana untuk 20% kebutuhan peralatan darurat.

Model diversifikasi ini sejalan dengan konsep "resource mobilization" dalam teori gerakan sosial (McCarthy & Zald, 1977) yang menekankan pentingnya kemampuan organisasi untuk mengakses dan memobilisasi sumber daya dari berbagai sources. Namun, dalam konteks organisasi formal seperti Satlinmas, implementasi strategi ini menghadapi tantangan regulasi dan akuntabilitas yang membutuhkan framework kebijakan yang mendukung. Analisis keberlanjutan menunjukkan bahwa strategi diversifikasi ini berpotensi menciptakan dependensi baru pada sumber daya eksternal yang tidak selalu dapat diprediksi. Donor internasional memiliki siklus pendanaan yang terbatas, sementara komitmen CSR perusahaan dapat berubah sesuai kondisi ekonomi. Oleh karena itu, strategi diversifikasi harus disertai dengan penguatan kapasitas internal untuk mengelola risiko ketergantungan dan membangun resiliensi finansial jangka panjang.

Rekonfigurasi Jaringan Sosial dalam Era Digital

Dimensi jaringan sosial mengalami transformasi signifikan dengan adopsi teknologi komunikasi digital, terutama platform WhatsApp yang mencapai tingkat penetrasi 85%. Transformasi ini menciptakan hybrid network yang mengkombinasikan jaringan sosial tradisional berbasis teritorial dengan jaringan digital yang melampaui batas geografis. Efektivitas komunikasi melalui WhatsApp (respons time rata-rata 15 menit) jauh lebih tinggi dibanding sistem komunikasi formal (respons time 2-3 hari). Namun, ketergantungan pada platform informal ini menciptakan risiko baru dalam hal dokumentasi, akuntabilitas, dan keamanan informasi. Informasi sensitif tentang kondisi keamanan dan kebencanaan sering disebarkan melalui grup yang tidak memiliki protokol keamanan yang memadai.

Castells (2015) mengargumentasikan bahwa "network society" menciptakan "space of flows" yang mentransformasi "space of places" dalam organisasi sosial. Dalam konteks Satlinmas, transformasi ini terlihat dalam pergeseran dari koordinasi berbasis hierarki teritorial menuju koordinasi berbasis jaringan yang lebih fleksibel tetapi kurang terstruktur. Integrasi jaringan digital dengan struktur sosial tradisional menunjukkan potensi optimalisasi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Pilot project yang mengintegrasikan grup WhatsApp dengan sistem "Sasi" digital untuk monitoring area rawan bencana menunjukkan peningkatan 40% dalam akurasi dan kecepatan pelaporan kejadian. Model ini memdemonstrasikan bagaimana teknologi dapat memperkuat, bukan menggantikan, sistem sosial tradisional.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama yang paling signifikan adalah identifikasi "paradoks kapasitas" dimana Satlinmas Kecamatan Sirimau menunjukkan kemampuan inovasi dan adaptasi yang tinggi dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, namun sekaligus mengalami stagnasi dalam indikator-indikator konvensional pengembangan kapasitas. Paradoks ini terlihat dalam kontras antara rendahnya tingkat partisipasi dalam program formal (45%) dengan tingginya efektivitas respons berbasis kearifan lokal (70% partisipasi dalam "Masohi" darurat).

Paradoks ini menantang asumsi linear dalam teori pengembangan kapasitas yang mengasumsikan bahwa peningkatan input (anggaran, pelatihan formal, peralatan) akan secara proporsional meningkatkan output (kinerja organisasi). Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks sumber daya yang sangat terbatas, inovasi sosial dan adaptasi kultural dapat mengkompensasi sebagian keterbatasan material, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan investasi sistemik dalam infrastruktur organisasi.

Temuan ini memiliki implikasi teoretis penting untuk pemahaman tentang resiliensi organisasi di negara berkembang, dimana keterbatasan sumber daya adalah kondisi struktural yang harus diterima sebagai konteks operasional, bukan masalah yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Organisasi yang berhasil beradaptasi adalah yang mampu mengoptimalkan "social capital" dan "cultural capital" untuk mengkompensasi keterbatasan "economic capital" dan "physical capital".

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian mengungkapkan adanya inovasi strategis dalam pengembangan kapasitas Satlinmas di Kecamatan Sirimau. Menghadapi keterbatasan anggaran pemerintah, Satgas Linmas telah mengembangkan strategi diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan dengan sektor swasta (kontribusi 15% dari total kebutuhan anggaran), kolaborasi dengan lembaga donor internasional seperti USAID dan UNDP (peningkatan keterampilan 35% anggota), dan penggalangan dana berbasis komunitas yang berhasil memenuhi 20% kebutuhan peralatan komunikasi darurat. Strategi diversifikasi ini menunjukkan potensi signifikan dalam mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah dan menciptakan model pendanaan yang lebih berkelanjutan untuk pengembangan kapasitas Satlinmas.

Temuan menarik lainnya adalah integrasi kearifan lokal Maluku dalam sistem perlindungan masyarakat, meliputi revitalisasi sistem "Pela Gandong" untuk meningkatkan kerjasama antar-Satlinmas di berbagai kelurahan, adopsi model "Masohi" (gotong royong tradisional) yang meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 40% dalam kegiatan tanggap darurat, dan pemanfaatan "Sasi" (aturan adat) untuk pengaturan aktivitas di kawasan rawan bencana yang berhasil mengurangi pemukiman di area berisiko tinggi hingga 25%. Integrasi kearifan lokal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial Satlinmas dan memperdalam rasa kepemilikan masyarakat.

Analisis data kejadian bencana dalam dua tahun terakhir menunjukkan korelasi positif antara tingkat kapasitas Satlinmas dengan resiliensi komunitas di Kecamatan Sirimau. Kelurahan dengan Satlinmas berkapasitas lebih tinggi menunjukkan reduksi hingga 70% korban jiwa akibat tanah longsor, peningkatan 45% dalam kecepatan dan jangkauan evakuasi saat banjir, serta akselerasi 30% dalam pemulihan pasca-bencana. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan kapasitas Satlinmas sebagai strategi fundamental dalam meningkatkan resiliensi komunitas terhadap bencana di wilayah dengan karakteristik geografis berisiko tinggi seperti Kecamatan Sirimau.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa proses pengembangan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat oleh Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Sirimau Kota Ambon belum optimal dalam mengintegrasikan empat dimensi utama pengembangan kapasitas. Proses pengembangan kapasitas menghadapi tantangan signifikan dalam dimensi partisipasi masyarakat yang diperlihatkan dengan minat sukarelawan terbatas (45%) dan mekanisme komunikasi formal yang belum efektif. Dimensi kepemimpinan menunjukkan ketimpangan gender dengan representasi perempuan hanya 10-15% dan sistem evaluasi kinerja yang belum terimplementasi secara menyeluruh (65%). Dimensi akses terhadap sumber daya menghadapi keterbatasan struktural dengan alokasi anggaran stagnan pada 0,25% dari anggaran kota dan kesenjangan peralatan mencapai 60-70% untuk komponen kritis. Dimensi jaringan sosial memperlihatkan koordinasi yang bervariasi dengan intensitas tinggi pada Satpol PP dan tokoh masyarakat, namun rendah pada organisasi kemasyarakatan.

Faktor penghambat utama dalam pengembangan kapasitas Satlinmas mencakup keterbatasan anggaran yang berdampak langsung pada operasional dan pengembangan program, kesenjangan peralatan yang menghambat respons efektif terhadap situasi darurat, struktur kepemimpinan yang belum inklusif gender, sistem teknologi informasi yang belum terintegrasi, serta advokasi kebijakan yang masih terbatas. Upaya mengatasi hambatan ini meliputi diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga donor, optimalisasi pemanfaatan peralatan melalui sistem rotasi berdasarkan prioritas, pengembangan kepemimpinan inklusif, dan integrasi kearifan lokal seperti "Pela Gandong" dan "Masohi" dalam sistem perlindungan masyarakat. Integrasi kearifan lokal terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 40% dalam kegiatan tanggap darurat.

Penelitian mengungkapkan bahwa kelurahan dengan tingkat kapasitas Satlinmas lebih tinggi menunjukkan resiliensi komunitas yang lebih kuat, ditandai dengan reduksi korban jiwa hingga 70% dan peningkatan efektivitas evakuasi sebesar 45%. Pengembangan kapasitas Satlinmas yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi yang mengatasi secara simultan tantangan dalam keempat dimensi, didukung kebijakan yang memadai, alokasi sumber daya yang proporsional, dan strategi pengembangan kapasitas berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus yang terbatas pada satu kecamatan tanpa perbandingan dengan kecamatan lain, perspektif masyarakat yang belum sepenuhnya merepresentasikan keragaman komunitas, serta analisis dampak yang masih bersifat korelasional. Penelitian masa depan perlu mengembangkan studi komparatif antar kecamatan, penelitian partisipatif dengan representasi komunitas yang lebih luas, studi longitudinal tentang dampak pengembangan kapasitas, eksplorasi mendalam tentang integrasi kearifan lokal, serta analisis ekonomi tentang rasio biaya-manfaat dari investasi dalam pengembangan kapasitas Satlinmas sebagai strategi pengurangan risiko bencana.

Arah Masa Depan Penelitian: Arah penelitian selanjutnya perlu difokuskan pada pengembangan model integrasi multidimensional dalam pengembangan kapasitas organisasi perlindungan masyarakat, analisis komparatif strategi pengembangan kapasitas di berbagai konteks geografis dan sosio-kultural, eksplorasi mendalam tentang potensi kearifan lokal dalam memperkuat sistem perlindungan masyarakat modern, serta pengembangan model pendanaan alternatif yang berkelanjutan untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon dan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kecamatan Sirimaudan seluruh pihak yang membantu menyelesaikan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social capital and community resilience. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254-269.
<https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0002764214550299>

- Alexander, D. E. (2013). Resilience and disaster risk reduction: An etymological journey. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 13(11), 2707-2716.
<https://nhess.copernicus.org/articles/13/2707/2013/nhess-13-2707-2013.html>
- Berkes, F., & Ross, H. (2013). Community resilience: Toward an integrated approach. *Society & Natural Resources*, 26(1), 5-20.
<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08941920.2012.736605>
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to qualitative research methods: A phenomenological approach to the social sciences*. John Wiley & Sons.
- Boin, A., & McConnell, A. (2007). Preparing for critical infrastructure breakdowns: The limits of crisis management and the need for resilience. *Journal of Contingencies and Crisis Management*, 15(1), 50-59. <https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.2007.00504.x>
- Castells, M. (2015). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Chaskin, R. J., Brown, P., Venkatesh, S., & Vidal, A. (2001). *Building community capacity*. Aldine de Gruyter.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E., & Webb, J. (2008). A place-based model for understanding community resilience to natural disasters. *Global Environmental Change*, 18(4), 598-606.
<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2008.07.013>
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80-88. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1558689812437186>
- Dey, I. (1993). *Qualitative data analysis: A user-friendly guide for social scientists*. Routledge.
- Goleman, D. (2000). Leadership that gets results. *Harvard Business Review*, 78(2), 78-90. <https://hbr.org/2000/03/leadership-that-gets-results>
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sector of developing countries*. Harvard University Press.
- Holstein, J. A., & Gubrium, J. F. (2020). *The active interview*. SAGE Publications.
<https://newdocs.opendeved.net/lib/VNS44H8M>
- Kapucu, N., & Garayev, V. (2011). Collaborative decision-making in emergency and disaster management. *International Journal of Public Administration*, 34(6), 366-375. <https://doi.org/10.1080/01900692.2011.561477>

- Kusumasari, B., & Alam, Q. (2012). Bridging the gaps: The role of local government capability and the management of a natural disaster in Bantul, Indonesia. *Natural Hazards*, 60(2), 761-779. <https://doi.org/10.1007/s11069-011-0016-1>
- Kvale, S. (2008). *Doing interviews*. Sage Publications.
- Lofland, J., & Lofland, L. H. (2006). *Analyzing social settings: A guide to qualitative observation and analysis* (4th ed.). Wadsworth.
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212-1241. <https://users.ssc.wisc.edu/~oliver/SOC924/Articles/McCarthyZald1977.pdf>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Milen, A. (2004). *Pegangan dasar pengembangan kapasitas*. Pondok Pustaka Jogja.
- Morgan, G. (1998). *Images of organization*. Sage Publications.
- Muladi. (2002). *Demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia*. Habibie Center.
- Ningtiyas, F. A. (2023). Implementasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 57-70. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/view/7261>
- Norris, F. H., Friedman, M. J., & Watson, P. J. (2002). 60,000 disaster victims speak: Part II. Summary and implications of the disaster mental health research. *Psychiatry*, 65(3), 240-260. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12405080/>
- Patel, S. S., Rogers, M. B., Amlôt, R., & Rubin, G. J. (2017). What do we mean by 'community resilience'? A systematic literature review of how it is defined in the literature. *PLOS ONE*, 12(2), e0172471. <https://currents.plos.org/disasters/article/what-do-we-mean-by-community-resilience-a-systematic-literature-review-of-how-it-is-defined-in-the-literature/>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Potter, C., & Brough, R. (2004). Systemic capacity building: A hierarchy of needs. *Health Policy and Planning*, 19(5), 336-345. <https://doi.org/10.1093/heapol/czh038>
- Pramono, A. C., & Kinasih, S. E. (2020). Penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Surakarta (Studi pemberdayaan dan pengorganisasian Satuan Perlindungan Masyarakat). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 127-142. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/rsfu/article/view/3394>
- Pramono, A. C., & Suranto, S. (2022). Peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kelurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota

Surakarta. Journal of Community Service, 4(1), 45-58.

<https://doi.org/10.36085/jams.v2i1.4599>

Prihantika, I., & Puspawati, D. (2021). Kapasitas komunitas Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dalam upaya mewujudkan Kabupaten Pringsewu Layak Anak. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 9(2), 112-126.

<https://doi.org/10.47679/jrssh.v1i2.17>

Quarantelli, E. L. (1998). What is a disaster? Perspectives on the question. Routledge.

Renschler, C. S., Frazier, A. E., Arendt, L. A., Cimellaro, G. P., Reinhorn, A. M., & Bruneau, M. (2010). Developing the 'PEOPLES' resilience framework for defining and measuring disaster resilience at the community scale. Proceedings of the 9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering, 1-10.

<https://www.eeri.org/coeeuscanada2010/papers/papers/Paper-No-1847.pdf>

Rohmanu, D. (2019). Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam penanggulangan bencana di Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik, 7(2), 87-99.

<https://core.ac.uk/download/pdf/229621735.pdf>

Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Bandung. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, 12(1), 25-40. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1234>

Rukmana, M. G. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Semarang. Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal, 15(2), 112-128. <https://doi.org/10.33701/jk.v1i2.536>

Soekanto, S. (2002). Sosiologi: Suatu pengantar. Raja Grafindo Persada.

Spradley, J. P. (1980). Participant observation. Holt, Rinehart and Winston.

Sugiyono. (2012). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Surjan, A., & Shaw, R. (2008). 'Eco-city' to 'disaster-resilient eco-community': A sustainability perspective from Tao-Yuan ecocity, Taiwan. Habitat International, 32(3), 269-295. http://dx.doi.org/10.14246/irspsd.5.2_35

Wolcott, H. F. (2009). Writing up qualitative research (3rd ed.). Sage Publications.

Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). Sage Publications.